



KR-Antara/Mohammad Ayudha

SOLIDARITAS BERBAGI MAKANAN: Seorang pengamen berkostum badut mengambil makanan yang disediakan gratis di Kampung Sudiropujan, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/9). Warga sengaja menyediakan tempat untuk menggantung makanan dalam aksi 'Mari Berbagi' sebagai bentuk solidaritas dan saling membantu antarwarga yang terdampak pandemi Covid-19.

OJK BAGIKAN TIPS

Hindari Jeratan Pinjol Ilegal

JAKARTA (KR) - Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagikan sejumlah tips untuk melakukan pinjaman secara online (pinjol) agar masyarakat terhindar dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan.

"Tips pertama, lakukan pinjaman kepada pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK, daftarnya ada di situs dan sosial media OJK, masyarakat dimohon meluangkan waktunya selama dua menit untuk melihat dan mengecek terlebih dahulu apakah pinjaman online yang akan dituju sudah terdaftar di OJK atau belum," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (3/9).

Tips kedua, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan melunasi, tidak melakukan pinjaman melebihi kemampuan atau meminjam untuk menutupi atau melunasi utang lama, ibarat gali lubang tutup lubang. "Jadi saat kita melakukan pinjaman pertama kemudian tidak mampu membayar, maka jangan coba-coba untuk melakukan pinjaman kedua karena pasti sudah tidak bisa," katanya.

Tongam menambahkan, tips ketiga, lakukan pinjaman untuk

kegiatan produktif guna mendorong ekonomi keluarga. Ini perlu dilakukan agar pinjaman yang diperoleh bermanfaat untuk mengembangkan perekonomian masing-masing keluarga.

"Tips terakhir, karena ini merupakan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, maka sebelum meminjam pahami dulu manfaat, risiko dan kewajiban dari pinjaman tersebut. Jangan setelah meminjam kemudian penerima pinjaman menyesal," pesan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK tersebut.

Sampai Juli 2021, total pinjol ilegal yang telah dihentikan OJK sebanyak 3.365 entitas. OJK mengungkapkan maraknya pinjol ilegal dapat dilihat dari dua sisi. Pertama

dari sisi pelaku pinjol ilegal, mereka mudah beraksi karena didukung kemudahan mengunggah aplikasi, situs, dan sebagainya ke teknologi digital.

Selain itu maraknya pinjol ilegal karena kesulitan pemberantasan yang dikarenakan lokasi server para pelaku banyak ditempatkan di luar negeri.

Sedangkan dari sisi masyarakat atau korban, maraknya pinjol ilegal dikarenakan rendahnya tingkat keuangan masyarakat dimana korban tidak melakukan pengecekan legalitas dan terbatasnya pemahaman terhadap pinjol. Di samping itu kebutuhan mendesak korban karena kesulitan keuangan memungkinkan maraknya pinjol ilegal.

(Ant/San)-d

KEMENAG ALOKASIKAN RP 63 MILIAR Sertifikasi Dosen PTKI Swasta Cair

JAKARTA (KR) - Persoalan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Swasta tahun 2019-2020 mulai ada titik terang. Kemenag telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 63 miliar dan siap dicairkan.

"Alhamdulillah, masalah tunggakan sertifikasi dosen PTKI Swasta 2019-2020 sudah ada solusi. Saya memastikan anggaran sebesar Rp 63.805.687.000 sudah ada dan sudah dapat diproses pencairannya oleh satker masing-masing," terang Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Jumat (3/9).

"Pembayaran tunggakan ini dapat dicairkan setelah sebelumnya dilakukan review oleh BPKP dan Itjen serta dilakukan revisi dan buka blokir," sambungnya.

Sejak dilantik menjadi Menag, ia mengaku kerap mendapat keluhan dari dosen swasta terkait tunggakan pembayaran sertifikasi bagi dosen swasta yang belum terbayarkan. Menag berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan tersebut dengan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tunggakan sertifikasi dosen swasta.

"Terkait pemenuhan hak-hak individual kami konsen betul, apalagi hak dosen yang memiliki fungsi, peran dan tugas yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya," tambahnya.

(Ati)-f

JADI MILIARDER DADAKAN DARI PROYEK TOL

Masyarakat Agar Bijak Kelola Uang

YOGYA (KR) - Banyak warga di Kabupaten Sleman yang mendadak menjadi miliarder setelah menerima ganti untung pembebasan lahan proyek pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen. Supaya nantinya uang ganti untung yang diterima tidak habis hanya sekedar untuk hura-hura atau membeli sesuatu yang kurang bermanfaat, Pemda DIY mengimbau agar masyarakat terdampak proyek pembangunan jalan tol tersebut bisa memanfaatkan uang ganti untung yang diterimanya secara bijak, untuk hal-hal produktif seperti modal usaha.

"Saya minta masyarakat yang menerima ganti untung sebagai dampak dari pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen bisa lebih bijak dalam membelanjakan uang yang dimilikinya.

Jangan sampai uang tersebut dimanfaatkan untuk hura-hura dan hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena jika hal itu yang dilakukan, dikhawatirkan uangnya hanya habis untuk keperluan konsumtif," pesan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji MM di kantornya, Jumat (3/9).

Baskara Aji menyatakan, supaya uang ganti untung yang diterima masyarakat bisa dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana, Pemkab Sleman maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu memberikan pembekalan dan pendampingan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa bijak dalam mengelola keuangan. Tidak ada salahnya apabila melibatkan atau bekerja sama dengan perbankan.

Dengan begitu perbankan bisa memberikan arahan dan pendampingan sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif dan tidak sekadar hura-hura semata. Karena dari pengalaman sebelumnya, ada masyarakat yang tidak mendapatkan arahan sehingga akibatnya uangnya habis untuk keperluan konsumsi.

"Uang ganti untung yang diterima diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat DIY yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Kendati demikian kami minta masyarakat tetap bijak dalam membelanjakan uangnya. Jangan sekadar untuk hura-hura, untuk itu saya berharap Pemkab maupun pihak-pihak terkait bisa melakukan pendampingan," harapnya.

(Ria)-d

SYARAT PENERBANGAN DILONGGARKAN

Harapkan Wisata Dibuka dengan Prokes Ketat

YOGYA (KR) - Industri penerbangan dan industri pariwisata menyambut baik kebijakan pelonggaran syarat penerbangan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), termasuk tidak perlunya tes RT PCR bagi calon penumpang yang sudah divaksin Covid-19 dosis kedua.

"Besarnya biaya tes PCR selama ini menjadi beban calon penumpang bahkan tidak sedikit yang kecewa pesawat batal terbang sesuai jadwal akibat syarat tersebut," ujar Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) DIY, Bonny Samudra kepada KR, Jumat (3/9).

Seperti diketahui, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 terkait aturan terbaru PPKM menyebutkan bahwa penumpang pesawat terbang yang sudah menerima dosis kedua vaksin Covid-19 tidak perlu lagi tes swab RT PCR sebagai salah satu syarat penerbangan. Dosis vaksinasi kini bisa menentukan kelonggaran dari persyaratan perjalanan menggunakan transportasi umum khususnya pesawat udara di wilayah

kategori level 2-4 Jawa-Bali. Calon penumpang hanya wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen dalam kurun waktu 1x24 jam.

Bonny berharap, jasa penerbangan akan meningkat, meski hingga hari ini belum ada pengguna jasa penerbangan yang merespons berita yang dilansir akhir bulan tersebut. Bisa jadi eksisting pengguna jasa penerbangan saat ini tinggal mereka yang tidak punya alternatif moda transportasi lain, mereka yang dibayai perjalanan dinas serta mereka yang tergolong berpenghasilan menengah ke atas. Sehingga penurunan beban perjalanan berupa biaya tes PCR tidak terlalu signifikan mengubah atau meningkatkan load faktor penumpang pesawat.

Adapun pelaku perjalanan wisata maupun masyarakat pada umumnya masih mempertimbangkan juga kemudahan perjalanan dan aktivitas di luar faktor perjalanan udara.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Dedy Pranowo Eryono juga menyambut baik kebijakan transportasi ini.

Namun demikian, kebijakan terus hendaknya diikuti dengan pembukaan kembali tempat wisata.

"Di Yogya saat ini masih banyak penutupan objek wisata dan daerah tujuan wisata. Adanya pembatasan akses ke pusat perbelanjaan, restoran, atraksi seni, pasti juga menjadi faktor pertimbangan wisatawan maupun masyarakat luas. "Dalam berwisata tergantung juga objek-objek wisatanya. Apakah sudah dibuka atau belum oleh Pemda," ujarnya.

Deddy berharap penegakan protokol kesehatan (prokes) ketat, termasuk di objek wisata. Menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencuci tangan sangat penting dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebetulnya kita berharap objek wisata itu dibuka dengan menerapkan prokes yang ketat serta diterapkannya aturan baru naik pesawat tersebut di objek wisata serta yang lainnya. "Sehingga wisatawan dan pemberi layanan wisata bisa menjaga diri dari penyebaran Covid-19," ujarnya.

(Jon)-d

SATGAS FASILITAS PUBLIK

Lakukan Tugas Secara Persuasif

JAKARTA (KR) - Satgas Protokol Kesehatan 3M fasilitas publik diharapkan dapat bersikap persuasif terhadap para pengunjung fasilitas publik. Satgas Protokol Kesehatan 3M di fasilitas publik ini dibentuk berdasarkan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 No 19 Tahun 2021. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas akan menerapkan sikap persuasif terhadap para pengunjung.

"Peran utama Satgas ini mengurangi laju penularan Covid-19 khususnya di lingkungan fasilitas publik. Tentu saja tugas tersebut dilaksanakan secara persuasif," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito di Jakarta, Jumat (3/9).

Dijelaskan Wiku, sikap persuasif satgas ini dilakukan dengan mengajak setiap masyarakat yang ada di fasilitas publik untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes). Seperti masuk dan keluar fasilitas publik dari pintu yang berbeda, mengukur

suhu tubuh saat masuk, mengingatkan agar memakai masker dengan benar, mencuci tangan, dan memastikan pengunjung memindai barcode aplikasi PeduliLindungi.

Menurut Wiku, Satgas akan bertugas di tempat-tempat aktivitas ekonomi dan belanja, hiburan dan olahraga, penyediaan akomodasi, pelayanan kesehatan, transportasi, kerja, pendidikan, sosial, penegakan hukum, energi dan lingkungan, serta aktivitas keagamaan. Satgas fasilitas publik ini akan menjalankan tiga fungsi utama yaitu pencegahan, pembinaan, dan pendukung. Dengan adanya Satgas ini, diharapkan dapat memupuk rasa tanggung jawab dan mempercepat upaya transisi hidup berdampingan dengan Covid-19.

Sementara itu sejumlah upaya terus dilakukan Pemda DIY untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19. Masih tingginya angka kematian menjadi salah satu prioritas penanganan. Antara lain dengan mengin-

tensifkan koordinasi dan mengoptimalkan keberadaan Satgas Penebalan Nakes, khususnya dalam memberikan pendampingan bagi para pasien Covid-19 agar mendapatkan layanan secara optimal.

"Meski saat ini jumlah kasus terus menurun, bukan berarti masyarakat menjadi lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena selama pandemi belum berakhir, prokes menjadi keharusan," kata Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di kantornya.

Baskara Aji mengatakan, untuk menekan angka kematian, pihaknya tengah berfokus untuk mengajak warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah agar pindah ke shelter isolasi. Hal itu dilakukan Satgas Penebalan Nakes yang sudah dibentuk supaya pengawasan terhadap pasien lebih mudah dilakukan. Satgas Penebalan Nakes antara lain bertugas memastikan kondisi pasien yang sedang menjalani isoman tidak memburuk.

(Ria/Ira/San)-d



KR-Antara/Ihdhad Zakaria

PEMBELAJARAN TATAP MUKA: Seorang murid mengikuti pembelajaran tatap muka usai menerima vaksin Covid-19 di SMPN 9 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (3/9). Sebanyak 54 sekolah di Kabupaten Banyumas mulai melakukan proses pembelajaran tatap muka dengan jumlah siswa yang diperbolehkan hanya 50 persen dari kapasitas dan tetap menerapkan protokol kesehatan serta vaksinasi Covid-19 secara bertahap bagi siswa di sekolah.